

Analisis *Share and Growth* serta Indeks Kemampuan Keuangan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

Fadilatun Nazmi¹, Sundari^{2*}, Sri Margiatin³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Indonesia
¹fadilatun1207@gmail.com, ^{2*}sundari@staff.gunadarma.ac.id,
³srimargiatin17@staff.gunadarma.ac.id

*Corresponding Author

Submit : 06 Jan 2026 | Diterima : 30 Jan 2026 | Terbit : 01 Feb 2026

ABSTRACT

The financial performance of a region can serve as an indicator of the local government's overall performance. One method of analyzing such financial performance is by examining financial ratios based on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) that has been determined and implemented. This study aims to measure the financial performance of the local governments of the regencies and cities surrounding the New Capital City (IKN) in East Kalimantan Province during the period 2020 – 2024. Several ratios used in the analysis of financial performance include Share and Growth, the Regional Financial Capability Mapping, and the Financial Capability Index (IKK). Based on the financial performance analysis conducted over five years for the four regencies and cities supporting the New Capital City (IKN), the following results were obtained. The share ratio of Samarinda City during the five-year period 2020 – 2024 falls under the low category. The share ratios of Penajam Paser Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency fall under the very low category. Meanwhile, Balikpapan City and Penajam Paser Utara Regency falls under the low category. Kutai Kartanegara Regency shows a moderate growth ratio, while Balikpapan City is categorized as very low. Based on the Share and Growth analysis within the Regional Financial Capability Mapping, two regions are positioned in Quadrant IV (Samarinda City and Penajam Paser Utara Regency), one region in Quadrant II (Kutai Kartanegara Regency), and one region in Quadrant III (Balikpapan City). Based on the Financial Capability Index (IKK), three regions fall under the high financial capability category, while one region is categorized as moderate.

Keywords: *Regional Financial Performance, Budget Realization Report, Share and Growth, Financial Capability Index (IKK)*

ABSTRAK

Kinerja keuangan suatu daerah dapat menjadi indikator terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan tersebut adalah dengan menelaah rasio-rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2024. Beberapa rasio yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan meliputi rasio Share dan Growth, Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Berdasarkan analisis kinerja keuangan yang dilakukan selama lima tahun terhadap empat kabupaten dan kota penyangga IKN, diperoleh hasil sebagai berikut. Rasio share Kota Samarinda selama periode 2020–2024 berada pada kategori rendah. Rasio share Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kategori sangat rendah. Sementara itu, rasio share Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada kategori rendah. Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan rasio pertumbuhan (growth) pada kategori sedang, sedangkan Kota Balikpapan tergolong sangat rendah. Berdasarkan analisis

Share dan Growth dalam Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah, dua daerah berada pada Kuadran IV (Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara), satu daerah berada pada Kuadran II (Kabupaten Kutai Kartanegara), dan satu daerah berada pada Kuadran III (Kota Balikpapan). Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), tiga daerah termasuk dalam kategori kemampuan keuangan tinggi, sementara satu daerah berada pada kategori sedang.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Share dan Growth, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola berbagai urusan rumah tangga daerah, termasuk pengelolaan keuangan. Kewenangan ini menuntut kemandirian finansial serta kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator fundamental untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu yang telah menerapkan otonomi daerah berupa pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km² (<https://www.kaltimprov.go.id/kondisiwilayah>). Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagian wilayah Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi IKN, yang menjadikan daerah-daerah sekitarnya seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda sebagai wilayah penyangga utama IKN.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh potensi ekonomi jangka panjang Indonesia dan visi transformasi menuju Indonesia 2045. Upaya ini didukung kebijakan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, serta reformasi birokrasi yang telah berjalan sejak 2020. Selain kesiapan pemerintah pusat, kesiapan daerah tujuan IKN juga krusial, terutama terkait potensi laju perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan yang efektif, seperti yang dijalankan pemerintah daerah akan berkontribusi pada kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjelaskan mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan mereformasi dan memperkuat kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menata menata ulang sistem keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih adil, transparan, akuntabel, dan sinergis.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah tersebut dicatat menjadi laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. LRA merupakan sebuah laporan keuangan yang disusun sebelum laporan arus kas dan neraca. Desain kinerja laporan tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan biaya pemerintah daerah dalam periode yang ditentukan, pemerintah daerah yang sebagai penyangga IKN dapat melakukan penilaian kinerjanya dengan beberapa penilaian rasio.

Analisis rasio keuangan daerah merupakan upaya untuk mengetahui karakteristik keuangan

daerah sesuai dengan laporan pengelolaan keuangan yang ada. Beberapa indikator utama dalam analisis kinerja keuangan. Analisis kemampuan keuangan merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja keuangan melalui APBD yang telah diterbitkan dan dilaksanakan. Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan dengan menelaah LRA yang menjabarkan kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk kepatuhan daerah terhadap APBD. Analisis kemampuan keuangan daerah, pada tahap awal dapat dimulai dengan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui Indeks *Share and Growth*. Kemampuan keuangan daerah dapat dikalsifikasikan dengan menggunakan Metode Kuadran. Metode Kuadran ditentukan berdasarkan nilai hasil *Share and Growth*.

Growth mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang di capai dari periode ke periode berikutnya. *Growth* dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Diawali dengan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. *Share* mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja pemerintah daerah yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD dari suatu kabupaten/kota. *Share* merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah.

Share and Growth merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah, pada penelitian (Kartika, 2023) menunjukkan bahwa rasio *share and growth* Kabupaten Enrekang pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, termasuk dalam kuadran IV dimana kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran PAD belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementara itu, daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal. Penelitian selanjutnya yang dilakukan (Farhani & Rozak, 2018), pada Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 – 2015 munjukan rasio *share and growth* Kota Cirebon masuk ke dalam kuadran II dimana kondisi ini belum ideal tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peranan besar dalam total belanja, walaupun sumbangan PAD masih rendah akan tetapi realisasi PAD setiap tahunnya mengalami perkembangan/pertumbuhan yang signifikan.

Langkah selanjutnya dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan menghitung Indek kemampuan keuangan (IKK) yang kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Menurut (Deddy, 2004), Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata – rata dari perhitungan Indeks *Share*, Indeks *Growth*, dan Indek Elastisitas. IKK pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Indeks ini menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Semakin tinggi nilai IKK, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber – sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks ini menunjukkan bahwa keuangan daerah masih sangat bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat.

Indikator lain dalam menilai kinerja keuangan yaitu Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, pada penelitian yang dilakukan oleh (Aminuddin & Winarningsih, 2024) pada Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 diketahui dari 27 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat yang memiliki hasil IKK Tinggi terdapat 13 daerah yaitu salah satunya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang yang berarti daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian fiskal yang kuat artinya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh relatif besar dibandingkan dengan sumber pendapatan dari transfer pusat maupun provinsi. Adapun 13 daerah selanjutnya yang memiliki hasil IKK Sedang yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis mencerminkan bahwa daerah sudah memiliki kemampuan keuangan yang cukup, namun belum sepenuhnya mandiri sehingga perlu strategi lebih lanjut untuk meningkatkan PAD agar ketergantungan terhadap pusat dapat semakin berkurang. Sedangkan daerah dengan IKK Rendah hanya ada 1 daerah yaitu Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan.

STUDI LITERATUR

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya menggunakan anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan dalam APBD. Analisis kinerja ini penting untuk menciptakan akuntabilitas publik dan memperkuat tata kelola pemerintah daerah. Tujuan dari analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, hasil analisis dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan ke depan.

Share and Growth

Menurut Bappenas, (2003) dalam Haryanto, (2017) mengemukakan bahwa penggunaan teori indikator Share and Growth yang dikombinasikan kedalam metode kuadran lebih sering digunakan oleh pihak pemerintah didalam menganalisis perbandingan kinerja khususnya berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penggunaan metode ini sering disebut-sebut sebagai salah satu upaya terbaik untuk dapat menampilkan peta kemampuan kuangan daerah. Nilai dari share berkontribusi melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap total belanja sementara nilai dari growth berkontribusi untuk melihat pengaruh pertumbuhan komponen pendapatan pada tahun kedepan dalam APBD. Indikator share digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan APBD terhadap jumlah belanja.

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Pengukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terakhir didasarkan atas aspek kondisi keuangan daerah. Aspek ini dinilai dengan menganalisis peta kemampuan keuangan daerah dan menghitung indeks kemampuan keuangan daerah. Menurut Muhibatri (2014), peta kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal yang diklasifikasikan dari hasil nilai rata-rata share and growth berdasarkan metode kuadran, analisis berdasarkan nilai rata-rata ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kenaikan atau penurunan yang terjadi di antara tahun sebelum dan tahun sesudah. Adapun tabel kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0,34-0,43	Sedang
0,44-1,00	Tinggi

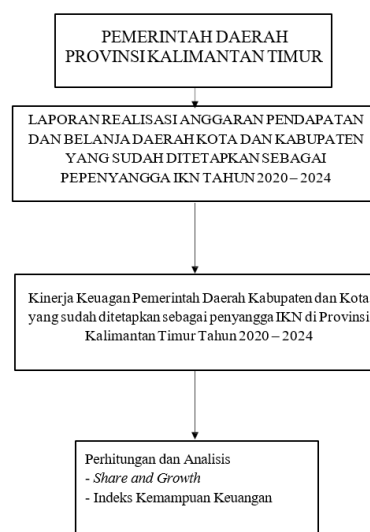
Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Suhendra (2021) dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara selama periode lima tahun yaitu 2016-2020 memiliki nilai kriteria sangat rendah, artinya Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai seluruh total Belanjanya dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Hayfani, Sintia, Jatmiko (2023), kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan sesudah pandemi Covid -19 tergolong baik. Rasio derajat desentralisasi dan kemandirian berada pada tingkat tinggi, dengan pola hubungan delegatif. PAD tergolong efektif, namun rasio efisiensi masih rendah karena belanja daerah melebihi pendapatan dan belanja operasional lebih dominan dibanding belanja modal. Selain itu, pandemi Covid -19 menyebabkan penurunan rasio pertumbuhan pada tahun 2020, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan stabilitas keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Aminuddin & Winarningsih, 2024) menunjukkan hasil bahwa Kinerja Keuangan Daerah Jawa Barat masih tergolong kurang optimal. Rasio kemandirian berada di kategori rendah, dan tingkat ketegantungan fiskal sangat tinggi, namun rasio desentralisasi fiskal termasuk sedang, sementara efektivitas PAD cukup tinggi, namun

efisiensi belanja masih rendah. Dari sisi kemampuan keuangan, rasio *share* PAD, menunjukkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih kecil, sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD (*growth*) tergolong rendah. Dalam peta *share* and *growth*, mayoritas daerah (21) berada di Kuadran II, 10 di Kuadran III, dan 14 di Kuadran IV. Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), sebanyak 13 daerah berkategori tinggi, 13 sedang, dan 1 daerah tergolong rendah. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja, sehingga analisis terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi penting untuk melihat posisi dan potensi daerah dalam periode 2020–2024.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sesuai pada gambar 1. sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota penyangga IKN di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020–2024, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang berwujud angka atau bilangan, yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari website resmi pemerintahan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa laporan tahunan realisasi anggaran pendapatan daerah pada Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan selama periode 2020–2024. Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi dan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah

daerah yaitu melakukan perhitungan beberapa rasio keuangan yang bersumber dari data APBD tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. *Share and Growth*

$$Share = \frac{PAD \times 100\%}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

$$Growth = \frac{PAD_t - PAD_{t-1} \times 100\%}{PAD_{t-1}}$$

Keterangan:

Growth : Pertumbuhan

PAD : Pendapatan Asli Daerah

t : Periode Saat Ini

t-1 : Periode Sebelumnya

2. Elastisitas

$$Elastisitas = \frac{PAD_t - PAD_{t-1} \times 100\%}{PDRB_t - PDRB_{t-1}}$$

3. Indeks Kemampuan Keuangan

$$Indeks\ X = \frac{Nilai - Nilai\ Minimum}{Nilai\ Maksimum - Nilai\ Minimum}$$

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

X_G : Indeks *Growth* (PAD)

X_E : Indeks Elastisitas (Pertumbuhan PAD terhadap Ekonomi)

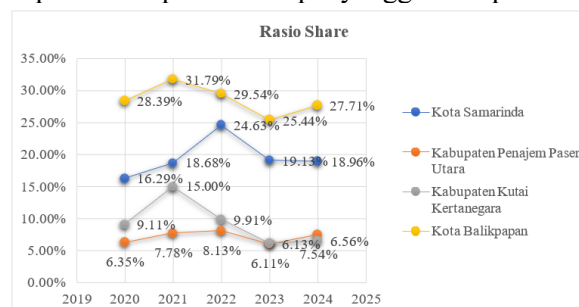
X_S : Indeks *Share* (PAD terhadap total Belanja)

Melalui perhitungan rasio-rasio tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah penyangga IKN dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

HASIL

Rasio *Share*

Rasio *share* digunakan untuk menilai kapasitas keuangan daerah dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap kebutuhan daerah; semakin besar nilainya, semakin mandiri daerah tersebut dalam menjalankan otonomi tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Daerah dengan kinerja keuangan baik mampu membiayai pengeluaran dari PAD, dan perhitungannya dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD dengan total belanja daerah pada Kabupaten/Kota penyangga IKN periode 2020–2024.



Gambar 2. Rasio *Share*

Berdasarkan gambar 2, grafik rasio *share* pada empat daerah penyangga Ibu Kota Negara (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara) selama periode 2020–2024, terlihat adanya perbedaan pola perkembangan di setiap daerah. Secara Umum, rata-rata rasio *share* keempat daerah menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Beberapa daerah seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda cenderung memiliki kontribusi PAD terhadap belanja daerah yang lebih besar, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber PAD masih perlu dilakukan terutama bagi daerah dengan rasio *share* rendah agar kontribusi terhadap pembiayaan belanja daerah meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arnaldi (2019) yang menyebutkan bahwa *share* Pad yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai belanjanya secara mandiri, sementara daerah dengan *share* rendah cenderung masih bergantung pada transfer pusat.

Rasio Growth

Rasio *growth* atau pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah penyangga IKN dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ini dilihat dari kenaikan PAD dalam APBD sebagai indikator kemandirian daerah. Jika rasio *growth* menunjukkan peningkatan positif, maka kinerja keuangan daerah dianggap baik, sedangkan penurunan atau nilai negatif menunjukkan kinerja belum baik. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan PAD tahun tertentu dengan PAD tahun sebelumnya pada Kabupaten/Kota penyangga IKN periode 2020–2024.



Gambar 3. Rasio Growth

Berdasarkan gambar 3, grafik rasio *growth* pada empat daerah penyangga Ibu Kota Negara (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara) selama periode 2020–2024, menunjukkan dinamika fluktuatif yang dipicu oleh faktor eksternal seperti pandemi covid-19 dan proyek IKN. Samarinda dan Kutai Kartanegara memperlihatkan pola ekstrem dengan lonjakan dan penurunan tajam. Penajam Paser Utara sempat tumbuh cepat di tahun 2022, lalu menurun, dan kembali meningkat di 2024. Balikpapan justru tampil lebih konservatif dan stabil, mulai dari kontraksi di 2020, pemulihan di 2021, hingga pemulihan bertahap secara rata-rata masih rendah sehingga optimalisasi sumber PAD yang lebih berkelanjutan diperlukan agar pertumbuhan dapat lebih stabil di masa mendatang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf dan Nugroho (2020) menegaskan bahwa daerah dengan *growth* tinggi cenderung memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memperkuat kemandirian, sedangkan daerah dengan *growth* rendah memerlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

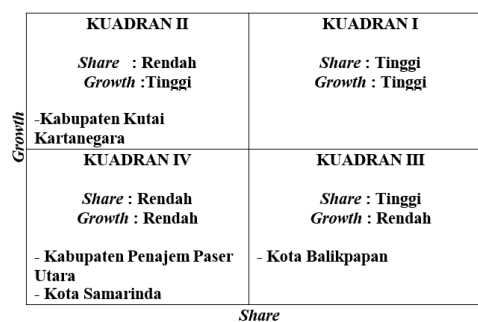
Peta Kemampuan Keuangan

Peta kemampuan *share* dan *growth* digunakan untuk menunjukkan sejauh mana daerah mampu menggali sumber keuangan sendiri dalam membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada dana pemerintah pusat. Peta ini disusun dengan metode kuadran, sehingga posisi suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan hasil perhitungan *share* dan *growth*. Melalui posisi kuadran tersebut dapat diketahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran. Semakin tinggi posisi daerah dalam kuadran, semakin baik kondisinya, sedangkan semakin rendah posisinya menunjukkan kinerja keuangan yang belum optimal.

Tabel 2. Rata-Rata *Share and Growth* Selama 5 Tahun

No	Kabupaten/Kota	<i>Share</i>		<i>Growth</i>		Kuadran
		(%)	Kriteria	(%)	Kriteria	
1	Kota Samarinda	19,54%	Rendah	14,39%	Rendah	IV
2	Kabupaten Penajam Paser Utara	7,18%	Sangat Rendah	13,02%	Rendah	IV
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	9,34%	Sangat Rendah	22,92%	Sedang	II
4	Kota Balikpapan	28,57%	Sedang	7,83%	Sangat Rendah	III

Berdasarkan dari perhitungan pada tabel 2, hasil analisis *share and growth* yang telah dilakukan, maka dapat disusun peta kemampuan keuangan pada gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 3. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Metode Kuadran

Berdasarkan gambar 3, kemampuan keuangan daerah penyangga IKN selama periode 2020–2024 dapat digambarkan melalui peta kuadran *share* dan *growth*. Tidak ada daerah yang berada pada Kuadran I (*share* tinggi, *growth* tinggi), sehingga belum ada daerah yang mampu menunjukkan kontribusi PAD besar sekaligus pertumbuhan yang tinggi. Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Kuadran II dengan pertumbuhan PAD tinggi namun kontribusi terhadap belanja daerah masih rendah, menandakan adanya potensi pengembangan ekonomi lokal yang dapat dioptimalkan. Penelitian Salviyani (2017) menekankan bahwa daerah dengan pertumbuhan PAD tinggi memiliki peluang besar untuk memperkuat basis pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Kota Balikpapan berada pada Kuadran III dengan kontribusi PAD cukup besar tetapi pertumbuhannya rendah, menunjukkan kemandirian fiskal relatif lebih baik dibandingkan daerah lain meski masih terbatas dalam memperluas basis penerimaan. Penelitian Haryanto (2017) menunjukkan bahwa daerah dengan *share* tinggi tetapi *growth* rendah perlu melakukan diversifikasi sumber PAD agar pertumbuhan dapat lebih berkelanjutan. Sementara itu, Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada Kuadran IV dengan *share* rendah dan *growth* rendah, yang mencerminkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih terbatas dan pertumbuhan belum stabil sehingga ketergantungan pada transfer pemerintah pusat tetap tinggi. Huda, Mus, dan Tjan (2020) menyatakan bahwa daerah pada Kuadran IV memerlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD agar kemandirian fiskal dapat meningkat secara bertahap.

Elastisitas

Elastisitas merupakan ukuran kepekaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB. Indeks ini bertujuan menilai sensitivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menghitung selisih pertumbuhan PAD dibandingkan selisih pertumbuhan PDRB, menggunakan data PDRB atas harga berlaku pada Kabupaten/Kota penyangga IKN periode 2020–2024.

Tabel 3. Ringkasan Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten/Kota Penyangga IKN Tahun 2020–2024

Tahun	Kota Samarinda	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kota Balikpapan
2020	6,98	7,19	0,77	12,70
2021	1,90	-0,02	0,90	1,95
2022	1,33	1,23	-0,26	0,35
2023	0,90	-0,08	-0,17	0,56
2024	2,73	0,49	-14,50	1,47

Berdasarkan tabel 3, nilai elastisitas PAD terhadap PDRB di daerah penyangga IKN menunjukkan pola yang berbeda-beda. Kota Samarinda cenderung fluktuatif dengan tren naik-turun, Kabupaten Penajam Paser Utara memperlihatkan pergerakan ekstrem dengan nilai positif dan negatif, Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan drastis hingga negatif besar pada akhir periode, sedangkan Kota Balikpapan relatif lebih stabil meski sempat menurun. Perbedaan ini menegaskan bahwa PAD di tiap daerah belum sepenuhnya selaras dengan pertumbuhan PDRB, sehingga kapasitas fiskal masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu Firmansyah (2017) menemukan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki elastisitas PAD yang rendah, menunjukkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan fenomena di beberapa daerah penyangga IKN yang menunjukkan fluktuasi besar, menandakan struktur PAD yang belum kokoh.

Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) salah satu indikator yang berfungsi melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. IKK sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Pertumbuhan (*Growth Index*), Indeks Elastisitas (*Elasticity Index*), dan Indeks *Share* (*Share Index*). Dalam pengukuran IKK, nilai maksimum dan minimum *share and growth*, dan elastisitas ditetapkan untuk setiap komponen sebagai parameter evaluasi.

Tabel 4. Capaian Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Penyangga IKN Tahun 2020 – 2024

Pemerintah Daerah (1)	Indeks <i>Share</i> (2)	Indeks <i>Growth</i> (3)	Indeks Elastisitas (4)	IKK (5) = $\frac{(2+3+4)}{3}$	Tingkat Kemampuan Keuangan (6)
Kota Samarinda	0,39	0,67	0,31	0,45	Tinggi
Kabupaten Penajam Paser Utara	0,53	0,39	0,25	0,39	Sedang
Kabupaten Kutai Kartanegara	0,36	0,55	0,77	0,56	Tinggi
Kota Balikpapan	0,49	0,64	0,25	0,46	Tinggi

Berdasarkan tabel 4, capaian indeks kemampuan keuangan (IKK) pemerintah daerah penyangga IKN tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan bahwa tiga daerah, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, memiliki IKK tinggi (0,44–1,00) yang mencerminkan kemandirian fiskal kuat dengan PAD relatif besar dibandingkan transfer pusat maupun provinsi. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada kategori IKK sedang (0,34–0,43), menandakan kemampuan keuangan cukup tetapi belum sepenuhnya mandiri sehingga memerlukan strategi peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Suhendra (2021) yang menyimpulkan bahwa meskipun PAD suatu daerah meningkat, ketergantungan terhadap transfer pusat tetap tinggi jika kontribusi PAD terhadap total belanja cukup besar. Lebih lanjut, penelitian oleh Hakim dan

Hidayat (2024) menegaskan bahwa kemandirian fiskal (yang tercermin melalui indek kemampuan keuangan) menjadi prasyarat penting agar desentralisasi fiskal dapat berjalan efektif. Dengan kata lain, meskipun Penajam Paser Utara menunjukkan perolehan IKK yang sedang, ia tetap memerlukan strategi intensifikasi PAD dan penguatan potensi ekonomi lokal agar kemandirian fiskalnya semakin meningkat di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Rangkuman hasil penelitian ini kabupaten dan kota penyangga IKN pada Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020-2024. Berisi hasil perhitungan rasio *share*, rasio *growth*, dan Elastisitas.

Tabel 5. Rangkuman Hasil Penelitian Kota dan Kabupaten Penyangga IKN

Kota Samarinda		
2020-2024	Share and Growth	Kuadran: IV <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Rendah
	Indeks Kemampuan Keuangan	Tinggi
Kabupaten Penajam Paser Utara		
2020-2024	Share and Growth	Kuadran: IV <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Rendah
	Indeks Kemampuan Keuangan	Sedang
Kabupaten Kutai Kartanegara		
2020-2024	Share and Growth	Kuadran: II <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Tinggi
	Indeks Kemampuan Keuangan	Tinggi
Kota Balikpapan		
2020-2024	Share and Growth	Kuadran: III <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Rendah
	Indeks Kemampuan Keuangan	Tinggi

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa hubungan antara *share* dan *growth* tidak selalu sejalan dengan hasil Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), yaitu sebagai berikut:

1. Kota Samarinda, *Share dan growth* rendah tetapi IKK tinggi, menunjukkan kapasitas fiskal tetap baik meski kontribusi PAD terbatas. Hal ini didukung oleh struktur penerimaan pajak yang stabil dan efektivitas pemungutan. Sejalan dengan penelitian (Hartono et al., 2021) yang menemukan bahwa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo meskipun berfluktuasi tetap mampu menjaga elastisitas fiskal.
2. Kabupaten Penajam Paser Utara, *Share* rendah, *growth* rendah, dan IKK sedang, mencerminkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih terbatas serta pertumbuhan tidak stabil. Sejalan dengan penelitian (Urip, 2014), penelitian ini mengukur elastisitas pajak terhadap PDRB, meskipun bukan di Ponorogo, menunjukkan pendekatan analisis elastisitas fiskal pajak.
3. Kabupaten Kutai Kartanegara, *Share* rendah, *growth* tinggi, namun IKK tinggi, menandakan pertumbuhan PAD yang cukup tinggi berhasil meningkatkan kemampuan fiskal meski kontribusinya kecil. Hasil ini mendukung penelitian (Christianingrum & Aida, 2021), Studi ini menunjukkan bahwa elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda antara wilayah, dan umumnya elastisitas PAD adalah salah satu indikator penting dalam analisis kapasitas fiskal daerah, di mana semakin responsif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih baik.
4. Kota Balikpapan, *Share* tinggi, *growth* rendah, tetapi IKK tinggi, menunjukkan kontribusi PAD besar meski pertumbuhannya rendah. Kota Balikpapan memiliki basis PAD yang kuat

dan signifikan terhadap keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian (Safitri & Sriningsih, 2025) penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa jenis pajak di Kabupaten Lombok Timur bersifat inelastis terhadap PDRB, artinya penerimaan pajak tidak meningkat secara proporsional seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai penyangga IKN di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis *share and growth* serta indeks kemampuan keuangan pada tahun anggaran 2020–2024. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki *share* rendah dan *growth* rendah sehingga berada pada kuadran IV, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki *share* rendah dan *growth* tinggi sehingga masuk kuadran II, sedangkan Kota Balikpapan dengan *share* tinggi dan *growth* rendah berada pada kuadran III. Sementara itu, berdasarkan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang mencakup indikator pertumbuhan, elastisitas, dan *share*, tiga daerah yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki IKK tinggi, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada kategori IKK sedang. Adapun implikasi yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah penyangga IKN perlu memperluas basis pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, optimalisasi retribusi, serta pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif, disertai pengendalian belanja rutin dan penguatan alokasi belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kolaborasi antar daerah penyangga dalam menciptakan iklim investasi dan memperkuat sektor unggulan agar kontribusi PAD semakin optimal. Pemerintah pusat diharapkan memberikan dukungan regulasi dan insentif fiskal yang proporsional bagi daerah penyangga, serta asistensi teknis dalam pengelolaan keuangan daerah agar peran strategisnya dalam mendukung pembangunan IKN dapat lebih seimbang. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan indikator lain seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja, serta mempertimbangkan faktor sosial, politik, maupun kelembagaan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah penyangga IKN, sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

REFERENSI

- Aminuddin, N., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(1), 404–427.
- Arnaldi, R. (2019). Analisis kemandirian keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 134–145
- Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah (Elasticity of Regional Original Income in the Era of Regional Autonomy). *Jurnal Budget*, 6(1), 58–73.
- Deddy. (2004). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Bappenas.
- Farhani, F., & Rozak, I. R. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011- 2015). *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 3(1). <https://doi.org/10.33603/reformasi.v3i1.1788>
- Hakim, L. A., & Hidayat, T. (2024). Evaluasi indeks kemampuan keuangan daerah di era desentralisasi fiskal. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Daerah*, 6(1), 88–102. <https://doi.org/10.1234/jakpd.v6i1.11848>
- Hartono, A., Ul'hasanah, A., & Hidayah, N. (2021). Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. *Japp: Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 1(02), 132–152. <https://doi.org/10.24269/japp.v1i02.4436>
- Haryanto, J. T. (2017). Analisis perbandingan peta kemampuan keuangan daerah penghasil SDA

- dan non-SDA. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 121–135.
- Hayfani, Y., Sintia, & Jatmiko, R. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan selama pandemi Covid-19. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3), 112–124. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.2063>
- Huda, N., Mus, A. R., & Tjan, J. S. (2020). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah pada pemerintah kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(2), 123–137.
- Kartika, Y. (2023). Kinerja Keuangan Daerah: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Dan Share And Growth. *FAIR : Financial & Accounting Indonesian Research*, 3(2), 110–119.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rahman, A., & Suhendra, D. (2021). Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Karo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4(2), 124–137. <https://doi.org/10.1234/jempper.v4i2.7931>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Salviyani, A. (2017). Pengukuran kemampuan keuangan daerah dengan rasio share dan growth. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 45–58.
- Safitri, R. A., & Sriningsih, S. (2025). Analisis Overlay dan Elastisitas Potensi Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2022. *ECo-Buss*, 7(3), 2160–2174. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i3.2295>
- Urip, T. P. (2014). Analisis Elastisitas Pajak Daerah Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(3), 19–37. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v1i3.2049>
- Yusuf, A., & Nugroho, R. (2020). Pertumbuhan PAD dan implikasinya terhadap kemandirian keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–60